



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**UNIT KERJA** : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **UCU SURYANA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **108336**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 920.000.000**

1. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 40.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/112 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1057 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 502 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/112 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m2/60 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 151.500.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI  
Rp. 8.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 20.000.000



4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI

Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 35.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.119.000.000

III. HUTANG

Rp. 345.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 774.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.